

# **LAPORAN**

## **PENGELOLAAN RISIKO**

### **TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**





**Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 57, Lamongan Kode Pos 62214**

**Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857 Pos-el : [dpmptsp@lamongankab.go.id](mailto:dpmptsp@lamongankab.go.id)**

**Laman : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)**

**NO DOKUMEN : 710/06/1413.111/2025**

**TANGGAL : 31 Desember 2025**

Disiapkan Oleh	:	<p><b>Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi</b></p>  <p><b>SRI WINARTI, SE.MM.</b> NIP.19800401 200312 2 006 Anggota</p>
Diperiksa	:	<p><b>Sekretaris</b></p>  <p><b>Ir. YAYUK SRIRAHAYU, ST.MT</b> NIP.19690428 200112 2 003 Koordinator</p>
Disahkan Oleh	:	<p>Lamongan, Desember 2025</p> <p><b>Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN</b></p>   <p><b>ETIK SULISTYANI, S.Sos., M.Si</b> Pembina Utama Muda NIP. 19710722 199203 2 005</p>

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manajemen risiko adalah proses perencanaan kegiatan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya risiko Organisasi. Termasuk adanya kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, dan penilaian hal-hal negatif yang dapat terjadi. Penerapan manajemen Risiko berpijak pada konsep SPIP yang telah dilaksanakan dan terintegrasi dengan strategi manajemen. Proses atau fungsi manajemen risiko sering diterjemahkan dalam tiga langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen risiko diharapkan membuat organisasi menjadi sadar risiko dan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Hasil yang diharapkan adalah keputusan yang tepat dan optimal bagi organisasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko. Maka Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. Berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/KEP/413.013/2024 tentang Struktur pengelolaan risiko Kabupaten Lamongan maka Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilaksanakan manajemen Risiko untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan daerah kreatif berwawasan budaya dan keseimbangan menuju keharmonisan sesuai visi Terwujudnya kejayaan Lamongan yang berkeadilan.

### **B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Lamongan;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
6. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/KEP/413.013/2024 tentang Struktur pengelolaan risiko Kabupaten Lamongan

### **C. Maksud dan Tujuan**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Manajemen risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- a. Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- b. Identifikasi risiko ;
- c. Analisis risiko ;
- d. Evaluasi risiko ;
- e. Pengendalian risiko ;
- f. Pemantauan dan telaah ulang ;
- g. Koordinasi dan komunikasi.

## **II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

### **A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tribulan IV**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyusun kegiatan- kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada tribulan IV sebagaimana terlampir.

### **B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan IV**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan - kegiatan pengendalian terhadap risiko – risiko yang dilaksanakan pada Tribulan IV sebagaimana terlampir

## **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko antara lain Keterbatasan kapasitas ASN pengelola manajemen risiko sehingga menjadi penghambat dalam merumuskan rencana tindak pengendalian terhadap risiko yang ada

## **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum perlu dilakukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya,dari hasil capaian kinerja yang sudah terealisasi menandakan bahwa risiko sudah dapat di minimalisir dan sisa risiko dapat diselesaikan pada tribulan IV. Sehingga Rencana tindak pengendalian yang sudah ada untuk terus dilaksanakan sesuai dengan jadwal rencana yang sudah di tentukan sampai dengan akhir tahun.

## **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV dapat simpulan bahwa sebagai tindak lanjut



dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai upaya perbaikan. selain itu peranan unit pengendali risiko sangat penting dalam pengelolaan risiko di mulai dari identifikasi risiko, pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana tindak pengendalian dan pemantauan. sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja kami akan melakukan evaluasi dan review terhadap rencana tindak pengendalian secara terpadu serta peningkatan kapasitas SDM pengelola Risiko.

# **LAMPIRAN**

1. Rencana Kegiatan TB IV
2. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko TB IV
3. Identifikasi Risiko Operasional OPD
4. Identifikasi Risiko Strategis OPD
5. Kertas Kerja Operasional OPD
6. Kertas Kerja Strategis OPD

**Formulir Kertas Kerja**  
**Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Lamongan										
Nama OPD	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Lamongan										
Tahun Penilaian	: 2025										
Periode yang dinilai	: 2025										
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan										
Sasaran strategis OPD	: Meningkatnya Efektivitas Investasi dan Meningkatnya Pelayanan Perizinan										
Urusan Pemerintahan	: Penanaman Modal										
OPD yang Dinilai	: Pemerintah Kabupaten Lamongan										

N o	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C / U C	Dampak**)		
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
					Risiko							
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
	PENANAMAN MODAL											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA											
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan	Perencanaan	<b>Risiko Operasional Kegiatan</b> Laporan penyusunan dokumen perencanaan	ROO.19.03.36.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya koordinasi dengan Bappelitbangda	Internal	C	Perencanaan kurang tepat	DPMPSTP	



				perangkat daerah tidak sesuai							
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan	Perencanaan	<b>Risiko Operasional Kegiatan</b> Laporan Evaluasi perangkat daerah kurang tepat	ROO.19.03.36.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya koordinasi dengan Bappelitbangda	Internal	C	Perencanaan kurang tepat	DPMPTSP
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Jaminan	Pertanggung jawaban	<b>Risiko Operasional Kegiatan</b> Laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	Internal	C	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan	DPMPTSP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Kegiatan	Pelaporan	<b>Risiko Operasional Kegiatan</b> koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	Internal	C	Pelaporan kurang tepat waktu	DPMPTSP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Kegiatan	Pelaporan	<b>Risiko Operasional Kegiatan</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	Internal	C	Pelaporan kurang tepat waktu	DPMPTSP

				Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD tidak tepat waktu							
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>										
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Kegiatan	Pertanggung jawaban	<b>Risiko Operasional Kegiatan</b> Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya tidak sesuai	ROO.19.03.02.5.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya disiplin Pegawai	Internal	C	Pelaporan kurang tepat waktu	DPMPSTSP
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Kegiatan	Pertanggung jawaban	<b>Risiko Operasional Kegiatan</b> Laporan pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi tidak sesuai	ROO.19.03.5.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya peningkatan kualitas SDM	Internal	C	pelaksanaan tidak sesuai dengan bidangnya	DPMPSTSP
	<b>Administrasian Umum Perangkat Daerah</b>										
	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	<b>Risiko Operasional Kegiatan</b> Laporan penyediaan komponen instansi listrik/ penerangan	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	Internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPSTSP

				bangunan kantor tidak sesuai							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	<b>Risiko Operasional Kegiatan</b> Laporan penyediaan peralatan rumah tangga tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	Internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPTSP
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	<b>Risiko Operasional Kegiatan</b> Laporan penyediaan bahan logistik kantor tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	Internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPTSP
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	<b>Risiko Operasional Kegiatan</b> Laporan penyediaan barang cetak dan penggandaan tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	Internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPTSP
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	<b>Risiko Operasional Kegiatan</b> Laporan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurang terpenuhi bahan bacaan	Internal	C	penyediaan bahan bacaan kurang tepat	DPMPTSP



	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarkannya Jasa	Penatausahaan	<b>Risiko Operasional Kegiatan</b> Laporan penyedia jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik tidak tepat waktu	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi jasa komunikasi, SDA dan listrik	Internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPTSP
	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	<b>Risiko Operasional Kegiatan</b> Laporan penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor kurang tepat	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi jasa sarana prasarana	Internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPTSP
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkannya Jasa	Penatausahaan	<b>Risiko Operasional Kegiatan</b> Laporan penyedia jasa pelayanan Umum Kantor kurang tepat	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya peningkatan kualitas SDM	Internal	C	penyediaan jasa pelayanan kurang tepat	DPMPTSP
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	<b>Risiko Operasional Kegiatan</b> penyediaan jasa pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan tidak sesuai	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurang terpeliharanya sarana prasarana	Internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPTSP

[illegible]

	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insemtif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	<b>Risiko Operasional Kegiatan</b> evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas tidak tepat waktu	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Kelola Penanaman Modal	Berkas dokumentasi tidak lengkap	Internal	C	Perencanaan kurang tepat	DPMPTSP
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota</b>										
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	<b>Risiko Operasional Kegiatan</b> peta potensi investasi tidak sesuai	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Kelola Penanaman Modal	kurang koordinasi dengan Bappelitbangda	Internal	C	peta potensi tidak lengkap	DPMPTSP
3	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>										
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	<b>Risiko Operasional Kegiatan</b> pelaksanaan kegiatan promosii tidak sesuai	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Kelola Penanaman	Kurang sesuai pelaksanaan kegiatan promosi	Internal	C	Pelaksnaan kegiatan promosi kurang tepat	DPMPTSP



						Modal					
4	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>										
	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu</b> dibidang <b>Penanaman Modal</b> yang menjadi <b>Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>										
	Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha berbasis resikoTerintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	<b>Risiko Pemangku Kepentingan</b> data perizinan per sektor setiap kecamatan belum	ROO.19.03.1.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Perizinan	kurang koordinasi dengan dinas terkait (tim teknis)	Eksternal	U C	sistem digital kurang memadai	Dinas kepada Masyarakat
	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	<b>Risiko Pemangku Kepentingan</b> layanan dan pengelolaan konsultasi perizinan berbasis resiko belum	ROO.19.03.1.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Perizinan	kurang tersedianya sarana layanan konsultasi dan pengaduan	Eksternal	U C	Rendahnya kepuasan Masyarakat	Dinas kepada Masyarakat
	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	<b>Risiko Pemangku Kepentingan</b> Pemantauan, analis, evaluasi dan pelaporan perizinan berusaha berbasis resiko belum	ROO.19.03.1.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Perizinan	kurang koordinasi dengan dinas terkait (tim teknis)	Eksternal	U C	Pelayanan kurang cepat	Dinas kepada Masyarakat

5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>										
	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota</b>										
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihaapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan kegiatan usahanya	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	<b>Risiko Pemangku Kepentingan</b> Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya belum	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Kelola Penanaman Modal	kurang koordinasi dengan pelaku usaha	Eksternal	U C	Rendahnya kepuasan Masyarakat	Dinas kepada Masyaraka t
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	<b>Risiko Pemangku Kepentingan</b> Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha belum	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Kelola Penanaman Modal	kurang ilmu pengetahuan pada pelaku usaha	Eksternal	U C	Rendahnya kepuasan Masyarakat	Dinas kepada Masyaraka t
	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	<b>Risiko Pemangku Kepentingan</b> Pengawasan penanaman	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	kurang koordinasi dengan pelaku usaha	Eksternal	U C	Rendahnya kepuasan Masyarakat	Dinas kepada Masyaraka t

				modal belum		Pintu/ Penata Kelola Penanaman Modal					
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>										
	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	<b>Risiko Operasional Kegiatan</b> pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan Informasi perizinan dan non perizinan berbasis sitem elektronik belum	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Kelola Penanaman Modal	kurang optimalnya pengelolaan data secara elektronik	Internal	C	penyajian data tidak tepat	DPMPTSP


**Formulir Kertas Kerja**  
**Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Lamongan									
Nama OPD	: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Lamongan									
Tahun Penilaian	: 2025									
Periode yang dinilai	: 2025									
Tujuan Strategis	: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan									
Urusan Pemerintahan	: Urusan Penanaman Modal									
OPD yang Dinilai	: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Lamongan									

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
				Risiko							
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
A	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan	Prosentase pertumbuhan ekonomi	Pengembangan Potensi Investasi Kurang Optimal	RSO.19.02.01.18	Bupati Lamongan	Kurangnya promosi investasi yang berdampak pada menurunnya minat investasi	Eksternal	UC	Prosentase pertumbuhan ekonomi rendah	Bupati Lamongan	
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA	Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMDN	Menurunnya Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMDN	RSO.19.02.01.18		Pajak Daerah yang Tinggi	Eksternal	UC	Prosentase Nilai Realisasi Investasi Rendah	Investor	
		Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMA	Menurunnya Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMA	RSO.19.02.01.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Regulasi dipandang masih rumit	Eksternal	UC	Prosentase Nilai Realisasi Investasi Rendah	Investor	

	Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	Menurunnya Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	RSO.19.02.01.18	Bidang Penata perizinan	Alur koordinasi yang terlalu panjang dari DPMPSTSP ke perangkat daerah lain	Eksternal	UC	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	Pemohon/ penerima layanan
	Program pengembangan iklim penanaman modal	Presentase peningkatan minat investasi	Menurunnya jumlah investor PMA dan PMDN	RSO.19.02.01.18	Bidang Penata kelola Penanaman modal	Kurangnya informasi potensi investasi di Kabupaten Lamongan	Eksternal	UC	Presentase minat investasi rendah	Investor
	Program Promosi Penanaman Modal	Presentase promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Menurunnya kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	RSO.19.02.01.18	Bidang Penata kelola Penanaman modal	Anggaran yang tidak tersedia tidak sesuai ketentuan	Eksternal	UC	Menurunnya minat investasi karena informasi potensi investasi di Kabupaten Lamongan kurang dipromosikan	Investor
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Presentase pengendalian perusahaan yang berinvestasi	Menurunnya perusahaan yang melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	RSO.19.02.01.18	Bidang Penata kelola Penanaman modal	Kurang pahamnya perusahaan akan kewajiban penyampain LKPM	Eksternal	UC	Pengendalian dan pengawasan perusahaan menjadi terhambat	Perusahaan/ Pelaku usaha
2	<b>Meningkatnya Pelayanan Perizinan</b>	Nilai IKM/SKM	Menurunnya Nilai IKM/SKM akibat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tidak dapat dilaksanakan dengan prima	RSO.19.02.01.18	Bidang Penata perizinan	SDM pelayanan yang belum optimal	Eksternal	UC	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	Pemohon/ penerima layanan
		Nilai SAKIP DPMPSTSP	Menurunnya Nilai SAKIP DPMPSTSP	RSO.19.02.04.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Kurangnya inovasi/perbaikan terkait manajemen kinerja	Eksternal	UC	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah dan efektivitas pelayanan rendah	Pemohon/ penerima layanan



INSPEKTORAT  
KABUPATEN LAMONGAN

Dinas Terkait

Pelaporan

Search now

DP

Kertas Kerja Strategis OPD

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama OPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun Penilaian

2025

Periode yang Dinilai

2025

Tujuan Strategis

Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Urusan Pemerintahan

Penanaman Modal

OPD yang dinilai

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan Strategis Pemerintah

Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sasaran

1. Meningkatnya Penduduk yang Bekerja 2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Action
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMDN	Menurunnya Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMDN	RSO.19.02.01.18	Kepala Dinas	Pajak Daerah Yang Tinggi	Eksternal	UC	Prosentase Nilai Realisasi investasi rendah	Investor	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
2	Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMA	Menurunnya Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMA	RSO.19.02.01.18	Kepala Dinas	Regulasi dipandang masih rumit	Eksternal	UC	Prosentase Nilai Realisasi investasi rendah	Investor	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
3	Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat waktu	Menurunnya Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	RSO.19.02.01.18	Penata Perizinan	Alur koordinasi yan terlalu panjang dari DPMPPTSP ke Perangkat Daerah lain	Eksternal	UC	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	Pemohon/Penerima layanan	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
4	Prosentase Peningkatan minat investasi	Menurunnya Jumlah investor PMA dan PMDN	RSO.19.02.01.18	Penata Kelola Penanaman Modal	Kurangnya informasi potensi investasi	Eksternal	UC	Prosentase minat investasi rendah	Investor	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
5	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	Menurunnya kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	RSO.19.02.01.18	Penata Kelola Penanaman Modal	kurangnya kegiatan promosi	Eksternal	UC	Menurunnya minat investasi karena informasi potensi investasi	Investor	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
6	Prosentase Pengendalian Perusahaan yang berinvestasi	Menurunnya Perusahaan yang melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	RSO.19.02.01.18	Penata Kelola Penanaman Modal	Kurang pahamnya perusahaan akan kewajiban penyampaian LKPM	Eksternal	UC	Pengendalian dan pengawasan Perusahaan menjadi terhambat	Perusahaan/ pelaku usaha	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
7	Nilai IKM/SKM	Menurunnya Nilai IKM/SKM akibat Pelayanan Perizinan dan non Perizinan tidak dapat dilaksanakan dengan prima	RSO.19.02.01.18	Penata Perizinan	SDM pelayanan yang belum optimal	Eksternal	UC	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	Pemohon/Penerima layanan	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
8	Nilai SAKIP DPMPPTSP	Menurunnya Nilai SAKIP DPMPPTSP	RSO.19.02.04.18	Kepala Dinas	Kurangnya inovasi/perbaikan terkait manajemen kinerja	Internal	C	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	Pemohon/Penerima layanan	<div>Edit</div>

INSPEKTORAT  
KABUPATEN LAMONGAN

☰

Search now

🔔

DP

Dinas Terkait

Pelaporan

Tambah Kertas Kerja Operasional Pemda

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Penilaian	2025
Periode yang Dinilai	2025
Tujuan Strategis	
Sasaran strategis OPD	
Urusan Pemerintahan	Penanaman Modal
OPD yang Dinilai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak		Action
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan	Perencanaan	Laporan penyusunan dokumen pemecanaan perangkat daerah tidak sesuai	ROO.19.03.36.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya koordinasi dengan Bappelitbangda	internal	C	Perencanaan kurang tepat	DPMPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan	Perencanaan	Laporan Evaluasi perangkat daerah kurang tepat	ROO.19.03.36.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya koordinasi dengan Bappelitbangda	internal	C	Perencanaan kurang tepat	DPMPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Jaminan	Pertanggung jawaban	Laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	internal	C	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan	DPMPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Kegiatan	Pelaporan	koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	internal	C	Pelaporan kurang tepat waktu	DPMPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Kegiatan	Pelaporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	internal	C	Pelaporan kurang tepat waktu	DPMPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
6	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Laporan penyediaan komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Laporan penyediaan peralatan rumah tangga tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Laporan penyediaan bahan logistik kantor tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>



Dinas Terkait

Pelaporan

Menu icon

Search now

DP

Kertas Kerja Strategis OPD

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama OPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun Penilaian

2025

Periode yang Dinilai

2025

Tujuan Strategis

Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa

Urusan Pemerintahan

Penanaman Modal

OPD yang dinilai

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan Strategis Pemerintah

Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa

Sasaran

Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah Meningkatnya Pemberdayaan Desa

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Action
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMDN	Menurunnya Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMDN	RSO.19.02.01.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pajak Daerah Yang Tinggi	Eksternal	UC	Prosentase Nilai Realisasi investasi rendah	Investor	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
2	Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMA	Menurunnya Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMA	RSO.19.02.01.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Regulasi dipandang masih rumit	Eksternal	UC	Prosentase Nilai Realisasi investasi rendah	Investor	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
3	Prosentase Penyelesaian Prizinan Tepat waktu	Menurunnya Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	RSO.19.02.01.18	Penata Perizinan	Alur koordinasi yan terlalu panjang dari DPMPPTSP ke Perangkat Daerah lain	Eksternal	UC	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	Pemohon/Penerima layanan	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
4	Prosentase Peningkatan minat investasi	Menurunnya Jumlah investor PMA dan PMDN	RSO.19.02.01.18	Penata Kelola Penanaman Modal	Kurangnya informasi potensi investasi	Eksternal	UC	Prosentase minat investasi rendah	Investor	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
5	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	Menurunnya kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	RSO.19.02.01.18	Penata Kelola Penanaman Modal	kurangnya kegiatan promosi	Eksternal	UC	Menurunnya minat investasi karena informasi potensi investasi	Investor	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
6	Prosentase Pengendalian Perusahaan yang berinvestasi	Menurunnya Perusahaan yang melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	RSO.19.02.01.18	Penata Kelola Penanaman Modal	Kurang pahamnya perusahaan akan kewajiban penyampaian LKPM	Eksternal	UC	Pengendalian dan pengawasan Perusahaan menjadi terhambat	Perusahaan/ pelaku usaha	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
7	Nilai IKM/SKM	Menurunnya Nilai IKM/SKM akibat Pelayanan Perizinan dan non Perizinan tidak dapat dilaksanakan dengan prima	RSO.19.02.01.18	Penata Perizinan	SDM pelayanan yang belum optimal	Eksternal	UC	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	Pemohon/Penerima layanan	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
8	Nilai SAKIP DPMPPTSP	Menurunnya Nilai SAKIP DPMPPTSP	RSO.19.02.01.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya inovasi/perbaikan terkait manaiemen kinerja	internal	C	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	DPMPPTSP	<div>Edit</div>

Menu icon

Search now

DP

Dinas Terkait

Pelaporan

Tambah Kertas Kerja Operasional Pemda

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Penilaian	2025
Periode yang Dinilai	2025
Tujuan Strategis	
Sasaran strategis OPD	
Urusan Pemerintahan	Penanaman Modal
OPD yang Dinilai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak		Action
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan	Perencanaan	Laporan penyusunan dokumen pemecanaan perangkat daerah tidak sesuai	ROO.19.03.36.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya koordinasi dengan Bapelitbangda	internal	C	Perencanaan kurang tepat	DPMPPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan	Perencanaan	Laporan Evaluasi perangkat daerah kurang tepat	ROO.19.03.36.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya koordinasi dengan Bappelitbangda	internal	C	Evaluasi Perangkat daerah kurang tepat	DPMPPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Jaminan	Pertanggung jawaban	Laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	internal	C	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan	DPMPPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Kegiatan	Pelaporan	koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	internal	C	Pelaporan kurang tepat waktu	DPMPPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Kegiatan	Pelaporan	koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	internal	C	Pelaporan kurang tepat waktu	DPMPPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
6	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Laporan penyediaan komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>

INSPEKTORAT

KABUPATEN LAMONGAN

Search now

DP

7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Laporan penyediaan peralatan rumah tangga tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Laporan penyediaan bahan logistik kantor tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Laporan penyediaan barang cetakan dan penggandaan tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Laporan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	kurangnya terpenuhi bahan bacaan	internal	C	penyediaan bahan bacaan kurang tepat	DPMPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Laporan fasilitasi kunjungan tamu tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurang terjamin fasilitas tamu	internal	C	penyediaan makan minum tamu kurang tepat	DPMPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan	Pertanggung jawaban	Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tidak tepat waktu	ROO.19.03.5.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya peningkatan kualitas SDM	internal	C	pelaksanaan tidak sesuai dengan bidangnya	DPMPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
13	Penyedia Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Terbayarkannya Jasa	Penatausahaan	Laporan penyedia jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik tidak tepat waktu	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi jasa komunikasi, SDA dan listrik	internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
14	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Laporan penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor kurang tepat	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
15	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkannya Jasa	Penatausahaan	Laporan penyedia jasa pelayanan Umum Kantor kurag tepat	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya peningkatan kualitas SDM	internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	penyediaan jasa pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan tidak sesuai	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurang terpeliharanya sarana prasarana	internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	penyediaan jasa pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan tidak sesuai	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurang terpeliharanya sarana prasarana	internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPTSP	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>

18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	pemeliharaan peralatan dan mesin tidak tepat waktu	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurang terpeliharanya sarana prasarana	internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPTSP	<a>Edit</a> <a>Hapus</a>
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	pemeliharaan/ rehab gedung tidak tepat waktu	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPTSP	<a>Edit</a> <a>Hapus</a>
20	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insemtif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas tidak tepat waktu	RSO.19.02.01.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Berkas dokumentasi tidak lengkap	internal	C	Perencanaan kurang tepat	DPMPTSP	<a>Edit</a> <a>Hapus</a>
21	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	peta potensi investasi tidak sesuai	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya koordinasi dengan Bappelitbangda	internal	C	peta potensi tidak lengkap	DPMPTSP	<a>Edit</a> <a>Hapus</a>
22	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	pelaksanaan kegiatan promosi tidak sesuai	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurang sesuai pelaksanaan kegiatan promosi	internal	C	Pelaksnaan kegiatan promosi kurang tepat	DPMPTSP	<a>Edit</a> <a>Hapus</a>
23	Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha berbasis resiko Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	data perizinan per sektor setiap kecamatan belum	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	kurang koordinasi dengan dinas terkait (tim teknis)	Eksternal	UC	sistem digital kurang memadai	Pemohon/Penerima layanan	<a>Edit</a> <a>Hapus</a>
24	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Layanan dan pengelolaan konsultasi perizinan berbasis resiko belum	ROO.19.03.1.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	kuang tersedianya sarana layanan konsultasi dan pengaduan	Eksternal	UC	Rendahnya kepuasan Masyarakat	Pemohon/Penerima layanan	<a>Edit</a> <a>Hapus</a>
25	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan kegiatan usahanya	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya belum	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	kurang koordinasi dengan pelaku usaha	Eksternal	UC	Rendahnya kepuasan Masyarakat	pelaku usaha	<a>Edit</a> <a>Hapus</a>
26	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha belum	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	kurang ilmu pengetahuan pada pelaku usaha	Eksternal	UC	Rendahnya kepuasan Masyarakat	pelaku usaha	<a>Edit</a> <a>Hapus</a>
27	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Pengawasan Penanaman Modal belum optimal	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	kurang koordinasi dengan pelaku usaha	Eksternal	UC	Rendahnya kepuasan Masyarakat	Perusahaan/ pelaku usaha	<a>Edit</a> <a>Hapus</a>
28	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan Informasi perizinan dan non perizinan berbasis sitem elektronik belum	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	kurang optimalnya pengelolaan data secara elektronik	internal	C	penyajian data tidak tepat	DPMPTSP	<a>Edit</a> <a>Hapus</a>